



LAPORAN KINERJA

**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN
JEMBER**

TAHUN 2019

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2020. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020.

Januari, 2021

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER**
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
Drs. SUPRAPTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610721 19863 1 011

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
A. RENCANA STRATEGIS	5
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	7
C. PERJANJIAN KINERJA	10
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	12
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2018.....	12
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	14
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	19
BAB IV. PENUTUP.	25
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2020 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yaitu "mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman".

Capaian Kinerja sasaran tahun 2020 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terciptanya Situasi dan Kondisi Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (Dua) indikator sasaran, dengan capaian 2 (Dua) indikator tergolong Sangat Baik.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 80% indikator capaian diatas target

yaitu dalam kategori **Sangat Baik** dan **Baik**, dalam kategori **Kurang** dan 20 % indikator tidak dapat disimpulkan capaiannya karena tidak tersedia data. Tidak tersedianya data merupakan permasalahan yang perlu dirumuskan upaya dan solusi alternative dalam rangka pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2020 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.6.911.054.395,48 (5,84%) merupakan Belanja Langsung atau sebesar Rp2.788.722.500,00 (1,66%) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.095.220.895,48 (4,18%)

Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 805.976.155.000,00 (29,27%) dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2020 antara lain:

1. Kegiatan tidak dapat di laksanakan karena proses administrasi

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Kegiatan tersebut dianggarkan lagi pada tahun anggaran 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah :

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 06 tahun 2012 sebagai berikut :

- (1) Bakesbangpol merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- (2) Bakesbangpol dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu koordinasi Hubungan Antar Lembaga, hubungan partai politik, hubungan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mediasi Integrasi Bangsa, fasilitas Kajian Strategis dan Politis serta Hak Azasi Manusia (HAM), menyelenggarakan kewenangan pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan kebijaksanaan Bupati.
- (4) Bakesbangpol dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan, mengatur, memberikan bimbingan dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi antar lembaga, integrasi

bangsa dalam rangka memelihara stabilitas bangsa di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

- b. Melaksanakan mediasi dan sinkronisasi dalam rangka fasilitas kegiatan Kajian Strategis dan Politis.
 - c. Melaksanakan pemantauan, pemasyarakatan, evaluasi, perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM).
 - d. Merumuskan perencanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan Parpol, Ormas, Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
 - e. Merumuskan dan merencanakan kebijakan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM).
 - f. Memfasilitasi Hubungan Antar Lembaga Legislatif, Eksekutif, hubungan Partai Politik, Yayasan, Ormas dan LSM dalam penyaluran aspirasi masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Wilayah dan Politik.
 - g. Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu anggota Legislatif, Presiden Wakil Presiden dan pemilihan Bupati.
 - h. Memfasilitasi penyelenggaraan pengembangan sistem Pendidikan Politik, melaksanakan sosialisasi kebijakan di bidang Politik.
 - i. Mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Bangsa, Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa dan rencana penetapan nilai-nilai kepahlawanan serta mengkoordinasikan penetapan tanda penghormatan dan jasa .
 - j. Mengeluarkan dan mengkaji rekomendasi perijinan untuk kepentingan pendidikan (riset, penelitian, Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan sejenisnya), hiburan/keramaian, penempatan tenaga kerja asing dan segala kegiatan yang akan mengganggu stabilitas.
 - k. Merumuskan kebijakan strategis dan politis dibidang Ideologi Politik Sosial dan Budaya di Wilayah/Daerah.
 - l. Meningkatkan Ketahanan Nasional masyarakat dengan upaya kesadaran bela negara.
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (5) Susunan organisasi Bakesbangpol terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 - * Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - * Sub Bagian Perencanaan
 - * Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik
 - * Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan
 - * Sub Bidang Lembaga Wilayah Dan Politik

d. Bidang Kesatuan Bangsa Dan Hak Asasi Manusia

- * Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

- * Sub Bidang Hak Asasi Manusia

e. Bidang Kajian Strategis dan Politis

- * Sub Bidang Kajian Ideologi Dan Politik

- * Sub Bidang Kajian Sosial , Ekonomi Dan Budaya

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Dan Politik telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember sesuai Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017, tentang Perubahan Rencana Strategis OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategistersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Badan Kesatuan bangsa Dan Politik merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyaratan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

2. Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1 (satu) Yaitu

“Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik “

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan 1: **“Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance),dan Bersih (Clean Government), serta Profesionalitas Pelayanan Publik”**

DenganSasaran: **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik”**

3. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik menetapkan strategi,kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

➤ Tujuan 1

Mewujudkan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman

➤ Sasaran 1

Terciptanya Situasi dan Kondisi Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman

➤ Strategi 1 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban

Kebijakan 1 Mengembangkan dan mensosialisasikan arti penting kewaspadaan nasional kepada aparatur dan masyarakat untuk NKRI.

Program 1 Pemeliharaan Kamtrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal.

➤ Strategi 2 Memelihara kewaspadaan Nasional agar terhindar dari upaya pemecah belahan bangsa (Disintegrasi Bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban.

Kebijakan 2 Meningkatkan pemahaman HAM di jajaran aparatur pemerintah dan masyarakat, kemampuan pemahaman terhadap masalah dan strategis pemecah masalah guna menghindari terjadinya konflik yang berdampak pada disintegrasi bangsa.

Program 2 : a. Sosialisasi dan edukasi produk hukum

- b. Sosialisasi dan edukasi HAM pada pelajar
- c. Pengadaan petugas mediator penanganan kasus HAM
- d. Pembentukan Lembaga resolusi konflik hukum dan penghormatan HAM

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2020.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 1 (satu) sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada Tahun Anggaran 2020 yaitu :

- 1. Sasaran 1 : Terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tertip dan nyaman

Indikator Sasaran 1 : Prosentase konflik sosial didaerah (konflik) yang tertangani

Indikator Sasaran 2 : Prosentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun (kasus) yang tertangani

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2020 sebanyak 6 (enam) program utama yaitu :

- a. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Indikator Program : Meningkatkan wawasan tentang pentingnya deteksi dini dan cegah dini

- b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Indikator Program : Terbentuknya Kader Bela Negara melalui Bimbel dan Satu Sekolah Satu TNI

- c. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Indikator Program : Sarasehan Peningkatan Pemahaman Pancasila
- d. Program Pendidikan Politik Masyarakat
Indikator Program : Terbentuknya Pelapor Pelaksanaan Pilgub
- e. Program Peningkatan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia
Indikator Program : Prosentase Terlaksananya Rencana Nasional Hak Asasi MANusia (RANHAM)
- f. Program Peningkatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosialisasi
Indikator Program : Sosialisasi Kegiatan Parpol dan Masyarakat

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik selama Tahun 2020 sebanyak 13 (Tiga Belas) kegiatan yaitu :

a. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal terdiri kegiatan-kegiatan :

- 1. Kegiatan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam memahami sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik di masyarakat
Indikator Keluaran Kegiatan : Meningkatkan wawasan tentang pentingnya deteksi dini dan cegah dini
- 2. Kegiatan :Peningkatan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Mengantisipasi Gangguan Kantrantibmas
Indikator Keluaran Kegiatan :Peningkatan Peran FKDM Dalam Mengantisipasi Gangguan Kantrantibmas

b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan terdiri kegiatan-kegiatan :

- 1. Kegiatan :Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

Indikator Keluaran Kegiatan : Sosialisasi dan Peningkatan Kinerja FKUB

2. Kegiatan :Peningkatan Kesadaran Bela Negara Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Bangsa

Indikator Keluaran Kegiatan : Pembentukan Kader Bela Negara

c. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Pentas Seni dan Budaya, Festifal, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Indikator Keluaran Kegiatan : Sarasehan Peningkatan Pemahaman Pancasila

2. Kegiatan : Peningkatan Forum Pembauran Kebangsaan (FKP)

Indikator Keluaran Kegiatan : Peningkatan Pembauran dalam Bermasyarakat

d. Program Pendidikan Politik Masyarakat terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Peningkatan Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu

Indikator Keluaran Kegiatan : Terbentuknya Pelapor Pelaksanaan Pilgub

2. Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran Kegiatan : Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Program Peningkatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosialisasi terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Fasilitas dan Verifikasi Pelaksanaan PAW Anggota DPR dan Verifikasi Bantuan Dana Partai Politik

Indikator Keluaran Kegiatan : Sosialisasi Kegiatan Parpol dan Masyarakat

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2020 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tertip dan nyaman	Persentase konflik sosial di daerah (konflik) yang tertangani	100
		Persentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun (kasus) yang tertangani	100

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor: 065/17 /1.31/2020 Tahun 2020;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
Terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang	Persentase konflik sosial di daerah (konflik)	Jml konflik sosial yg tertangani :	Bakesbangpol Kab. Jember	Bakesbangpol Kab. Jember

aman, tertip dan nyaman	yang tertangani	jmlkonflik x 100%		
	Persentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun (kasus) yang tertangani	Realisasi tahun sekarang :Realisasi tahun sebelum x 100%		

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tertip dan nyaman	1 Prosentase konflik sosial di daerah (konflik) yang tertangani	100	100	100
		2 Prosentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun (kasus) yang tertangani	100	100	100

- Untuk indikator persentasi konflik sosial yang tertangani dengan capaian 100 % atau kategori baik. Dari data bidang Kajian Strategis dan Politis selama tahun 2020 jumlah keseluruhan konflik sebanyak 13 (tiga belas) yang meliputi konflik ekonomi, konflik sosial budaya, Konflik politik, konflik ideologi. Dari sejumlah 13 konflik yang terjadi di Kabupaten Jember pada tahun 2020 secara keseluruhan dapat ditangani.

Hal ini karena :

1. Adanya tim kewaspadaan dini di daerah (terdiri dari yang telah melaksanakan deteksi dini dan cegah dini terhadap permasalahan yang timbul dan

berkembang di wilayah Kabupaten Jember.

2. Karena kinerja tim kepada penanganan konflik sosial Kabupaten Jember telah melaksanakan tugasnya dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya apresiasi terhadap tim terpadu penanganan konflik sosial Kabupaten Jember sebagai tim peringkat 5 terbaik se-Jawa Timur pada tahun 2020.

Terdiri dari OPD Pemkab Jember, Polres, Kodim dan Binda Pos Jember.

- Untuk persentase pelanggaran HAM di Kabupaten Jember pada tahun 2020 tidak ada, sehingga di Kabupaten Jember sudah diselenggarakan Vestifal HAM pada tanggal 19 – 21 Nopember 2019.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2020, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 10 (Sepuluh) indikator kinerja dari 1 (satu) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

Tujuan 1 :Mewujudkan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman

Sasaran 1:Terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tertip dan nyaman

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI		
				Th.2016 (n-1)	Th. 2017 (n)	Th. 2019 (n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tertip dan nyaman	1 Prosentase konflik sosial didaerah (konflik) yang tertangani	100%	100%	100%	100%
		2 Prosentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun (kasus) yang tertangani	100%	100%	100%	100%

SumberData: Bakesbangpol

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja.d.Akhir PeriodeRENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIRRE NSTRA	REALISASI Th. 2019	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1	Terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tertip dan nyaman	1 Prosentase konflik sosial didaerah (konflik) yang tertangani	100	100	
		2 Prosentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun	100	100	

SumberData: Bakesbangpol

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th.2019	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tertip dan nyaman	1. Prosentase konflik sosial di daerah (konflik) yang tertangani 2. Prosentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun	100%	-	

SumberData: Bakesbangpol data realisasi nasional tidak tersedia*

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **100%**, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **sangat berhasil/ berhasil/ kurang/cukup**.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran1** terdiri dari 6(Enam) program dan 13 (Tiga belas) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Memahami Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik di Masyarakat

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Meningkatkan pemahaman tentang diteksi dini dan cegah dini	: 479.900.000,00 : 1 Tahun	0,00
Output/Keluaran : Meningkatkan wawasan tentang pentingnya deteksi dini dan cegah dini	: 1 Tahun	0,00
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana		

- b. Peningkatan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Mengantisipasi Gangguan Kantrantibmas

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Terjalannya sinergitas 3 pilar	:	243.690.000,00	0,00
	:	1 Tahun	
Output/Keluaran : Peningkatan peran FKDM dalam mengantisipasi gangguan kantrantibmas	:	1 Tahun	
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan tidak dapat di laksanakan karena proses administrasi			

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Terjadinya harmonisasi sosial efektivitas kinerja lembaga	:	0,00	0,00
	:	1 Tahun	
Output/Keluaran : Soialisasi dan peningkatan kinerja FKUB	:	1 Tahun	
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan tidak dapat di laksanakan karena proses administrasi			

b. Peningkatan Kesadaran Bela Negara Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Bangsa

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Terciptanya rasa nasionalisme patriotisme	:	0,00	0,00
	:	1 Tahun	
Output/Keluaran : Pembentukan Kader Bela Negara	:	1 Tahun	
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana			

3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. Pentas Seni dan Budaya, Festifal, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Pemantapan terhadap pancasila	:	0,00	0,00

	:	1 Tahun	
Output/Keluaran : Sarasehan peningkatan pemahaman pancasila	:	1 Tahun	
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana			

b. Peningkatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Terjadi rasa kebersamaan dalam perbedaan etnis suku	:	0,00	0,00
	:	1 Tahun	
Output/Keluaran : Peningkatan pembauran dalam bermasyarakat	:	1 Tahun	
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana			

4. Program Pendidikan Politik Masyarakat

a. Peningkatan Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Laport cepat dalam proses perhitungan suara	:	928.080.000,00	289.400.000,00
	:	1 Tahun	
Output/Keluaran : Terbentuknya tim pelapor pelaksanaan pilgub	:	1 Tahun	
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana			

b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	:	0,00	0,00
	:	1 Tahun	
Output/Keluaran : Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dalam RAngka Penciptaan Situasi Pemilu yang Aman Jujur dan Adil	:	1 Tahun	
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana			

5. Program Peningkatan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Terlaksananya Rencana Nasional Hak Asasi Manusia	:	0,00 1 Tahun	0,00
Output/Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi Pelaksanaan RANHAM	:	1 Tahun	
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana			

6. Program Peningkatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial

a. Fasilitas dan Verifikasi Pelaksanaan PAW Anggota DPRD dan Verifikasi Bantuan Dana Partai Politik

		Target	Realisasi
Input/ Masukan : Meningkatnya kerjasama aparatur pemerintah dengan masyarakat dan parpol	:	57.140.000,00 1 Tahun	0,00
Output/Keluaran : Sosialisasi kegiatan parpol dan masyarakat	:	1 Tahun	
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana			

FOTO KEGIATAN

1. Kegiatan Peningkatan Peran dan efektifitas Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Pemilu (DESK)



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK tahun 2020 adalah sebesar Rp. 10.338.865.903,68- yang terdiri dari:

	Belanja	Anggaran	Realisasi
a.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 4.095.220.895,48	Rp. 1.826.684.537,00
b.	Belanja Langsung	6.883.943.395,48	Rp. 2.632.660.692,00
	- Belanja Pegawai	Rp. 4.122.331.895,48	Rp. 1.826.684.537,00
	- Belanja Barang/jasa	Rp. 2.761.611.500,00	Rp. 805.976.155,00
	- Belanja Modal	Rp. 0	Rp. 0

Proporsi Anggaran pada tahun 2020, Belanja Langsung sebesar 0,66% dan Belanja Tidak Langsung sebesar 0%

2. Alokasi Anggaran Belanja langsung

Keseluruhan anggaran belanja langsung perprogram dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2020 terdiri dari:

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	2	3	4	5
2.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	479.900.000,00	0	0
3.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Memahami Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik di Masyarakat	479.900.000,00	0	0
4.	Peningkatan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Mengantisipasi Gangguan Kantrantibmas	0	0	0
5.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	0	0	0
6.	Peningkatan Kesadaran Bela Negara Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Bangsa	0	0	0
7.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.073.500.000,00	0	0
8.	Peningkatan Peran dan Efektifitas Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Pemilu (DESK)	928.750.000,00	289.400.00,00	0,31%
9.	Sosialisasi Dalam Rangka Penciptaan Situasi Pemilu yang Aman Jujur dan Adil	144.750.000,00	0	0

10.	Program Peningkatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial	57.140.000,00	0	63,00%
11.	Fasilitas dan Verifikasi Pelaksanaan PAW Anggota DPRD dan Verifikasi Bantuan Dana Partai Politik	57.140.000,00	0	0
12.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	905.336.500,00	531.711.137,00	1,70%
13.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	64.640.762,00	1,55%
14.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.600.000,00	17.698.395,00	1,05%
15.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	48.000.000,00	17.901.338,00	2,68%
16.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.800.000,00	18.487.500,00	2%
17.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.705.000,00	2.074.000,00	2,75%
18.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	4.300.000,00	1,67%
19.	Penyediaan Makanan dan Minuman	149.957.500,00	44.489.170,00	3,37%
20.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	155.310.000,00	54.060.006,00	2,92%
21.	Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaraan Operasional Kantor	109.800.000,00	85.798.587,00	1,28%

22.	Rapat-rapat Koordinasi , Konsultasi Dalam Daerah	52.000.000,00	49.970.000,00	1,04%
23.	Penyediaan Peralatan dan Kebersihan	15.000.000,00	7.094.589,00	2,11%
24.	Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	203.964.000,00	165.196.790,00	1,23%
25.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.119.506.695,48	2.780.414.470,00	2,56%
26.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1.200.000,00	0,00	0,00%
27.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	47.013.300,00	15.387.751,00	3,06%
28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	187.350.000,00	42.155.939,00	4,44%
29.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	6.883.943.395,48	2.722.870.780,00	2,48%
		6.243.645.000,00	2.003.486.242,00	66,84%

3. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2019, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

- a. Untuk Sasaran Starategis I: Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib aman dan nyaman Didukung oleh :
 - Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan Anggaran Rp1.639.292.500,00

- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan Anggaran Rp. 1.942.263.000
- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan anggaran Rp. 18.010.000
- Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dengan anggaran Rp. 0
- Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan anggaran Rp. 330.710.600
- Program Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial dengan anggaran Rp. 86.890.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 2.209.431.400 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

BAB IV PENUTUP

Dalam tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan / pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik tahun 2016-2021.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik/Kurang** karena dari 31 (tiga puluh satu) indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) indikator dalam kategori baik, dan 2 (dua) indikator dalam kategori kurang.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 6.009.392.585,00 (69,26%) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.824.981.996,00 (2,24%) dan Belanja langsung sebesar Rp. 4.184.410.589,00 (67,02%)

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Kegiatan sosialisasi tidak dapat terlaksana karena proses administrasi

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2019 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Kegiatan tersebut dianggarkan lagi pada tahun anggaran 2019

Demikian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2019

sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2019.

RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran			
					2015	2016	2017	2019	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Mewujudkan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Prosentase konflik Sosial di Daerah (konflik) yang tertangani	Terciptanya Situsi dan Kondisi Masyarakat yang aman, tertip dan nyaman	Prosentase konflik Sosial di Daerah (konflik) yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban	Mengembangkan dan mensosialisasikan arti penting kewaspadaan Nasional kepada aparaturnya dan masyarakat untuk NKRI.	Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
		Prosentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun (kasus) yang tertangani		Prosentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun (kasus) yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	Memelihara kewaspadaan Nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasikan bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban.	Meningkatkan pemahaman HAM di jajaran aparaturnya dan masyarakat, kemampuan pemahaman terhadap masalah dan strategis pemecahan masalah guna menghindari terjadinya konflik yang berdampak pada disintegrasi bangsa.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Program sosialisasi dan edukasi produk hukum. ✓ Program sosialisasi dan edukasi HAM pada pelajar. ✓ Program pengadaan petugas mediator penanganan kasus HAM. ✓ Program pembentukan lembaga resolusi konflik hukum & penghormatan HAM.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen. S. Parman Nomor 89 ☎ 0331-337853 Jember

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalamrangkamewujudkanmanajemenpemerintahan yang efektif, transparan, danakuntabel sertaberorientasipadahasil, kami yang bertandatangandibawahini :

Nama : Drs. BAMBANG HARIONO, MM
Jabatan : Kepala Bakesbang dan Politik Kabupaten Jember
Selanjutnyadisebutpihakpertama.

Nama : dr. Hj. FAIDA, MMR.
Jabatan : Bupati Jember

Selakuatasanshipakpertama, selanjutnyadisebutpihakkedua

Pihakpertamaberjanjiakanmewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalamrangkamencapai target kinerja yang akan menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihakkedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

dr. Hj. FAIDA, MMR.

Jember, Januari 2020

Pihak Pertama
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER



Drs. BAMBANG HARIONO, MM
NIK 19620131 198201 1 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban	Prosentase konflik Sosial di Daerah (konflik) yang tertangani	100 %
2.	Memelihara kewaspadaan Nasional agar terhindar dari upaya pemecah belahan bangsa (disintegarasibangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, social budaya, keamanan dan ketertiban.	Prosentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun (kasus) yang tertangani	100%

Program

	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 952.336.500	PAPBD
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 273.516.000	PAPBD
3. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 808.662.500	PAPBD
4. Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 835.515.000	PAPBD
5. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 155.593.500	PAPBD
6. Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 1.072.830.000	PAPBD
9. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial	Rp. 57.140.000	PAPBD
Jumlah	Rp. 6.243.645.000	

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

dr. Hj. FAIDA, MMR.

Jember, November 2020

Pihak Pertama

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER**



Drs. BAMBANG HARIONO, MM

NIP. 19620131 198201 1 005



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 • 337853 Jember

**DRAF RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
 TAHUN 2020**

RPJMD

MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN
2.	Mewujudkan Pemenuhan	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1. Jumlah Intensitas pertemuan intern umat beragama per tahun 2. Jumlah pertemuan antar-umat beragama
		1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama dalam rangka mewujudkan Jember uyan beriman dan bertakwa 2. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih 3. Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan openghormatan hak azasi manusia (HAM) yang berkeadilan dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih		1. Jumlah Konflik Sosial 1. Jumlah pelanggaran hukum dan/atau HAM per tahun

TUJUAN OPD		SASARAN OPD		PROGRAM			KEGIATAN					
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran	
1.	Terciptanya Situasi dan Kondisi Masyarakat yang aman, tertip dan nyaman	1. Persentase Konflik Sosial di Daerah(Konflik) yang tertangani	Jumlah Konflik sosial yang tertangani	1. Persentase Konflik Sosial di Daerah(Konflik) yang tertangani	100%	1. Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	%Rasa Kepedulian Terhadap Stabilitas Wilayah	100%	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Memahami Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik di Masyarakat	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	100%	479.900.000,00

	2. Persentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun(kasus) yang tertangani							2.	Peningkatan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Mengantisipasi Gangguan Kantrantibmas	Peningkatan Peran FKDM Dalam Mengantisipasi Gangguan Kantrantibmas	100%	328.762.500,00	
								3.	Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial	1.Rapat Koordinasi dengan Instansi/OPD, TNI-POLRI. 2. Sosialisasi terhadap	100%	442.300.000,00	
					2.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	% Terciptanya Ketahanan Bangsa	100%	1.	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Sosialisasi dan Peningkatan Kinerja FKUB	1 Tahun	107.769.600,00
								2.	Peningkatan Kesadaran Bela Negara Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Bangsa	Sosialisasi pembentukan bela negara satu sekolah satu TNI	1 Tahun	835.515.800,00	
								3.	Gerakan Nasional Revolusi Mental	Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016	1 Tahun	157.073.500,00	
								4.	Pemberdayaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Tercapainya pengembangan pendidikan wawasan kebangsaan	1 Tahun	303.648.000,00	
					3.	Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	% Terwujudnya Ketentraman dalam Lingkungan	100%	1.	Peningkatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Pembauran dalam bermasyarakat	1 Tahun	629.195.000,00
					4.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarkat	% Terwujudnya Ketahanan Bangsa	100%	1.	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	dan Dialog interaktif dalam rangka pencegahan peredaran	1 Tahun	99.000.000,00

					5.	Program Pendidikan Poilitik Masyarakat	%Situasi pelaksanaan pemilihan yang kondusif	100%	1.	Peningkatan Peran dan Koordinasi Tim Pemantau Perkembangan Politik	Tim Pemantau Perkembangan Politik	1 Tahun	781.560.000,00
									2.	Peningkatan Peran dan Efektifitas Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Pemilu (DESK)	Pemantauan lapangan pelaksanaan pemungutan suara dan penerimaan laporan hitung cepat	1 Tahun	600.000.000,00
									3.	Sosialisasi Dalam Rangka Penciptaan Situasi Pemilu Yang Aman Jujur dan Adil	Sosialisasi pemilu yang aman jujur dan adil	1 Tahun	183.500.000,00
					6.	Program Kerjasama Antar Lembaga Organisasi Kemasyarakatan dan Politik	%Peningkatan Konsultasi dan Kerjasama Ormas	100%	1.	Peningkatan Konsultasi dan Kerjasama Ormas	Konsultasi dan kerjasama ormas	1 Tahun	183.500.000,00
					7.	Program Peningkatan dan Pemajuan Hak Azasi Manusia (RANHAM)	%Pemajuan Hak Azasi Manusia	100%	1	Peningkatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)	Persentase pelaksanaan RANHAM	1 Tahun	88.485.000,00
					8.	Program Peningkatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial	%Sosialisasi kegiatan parpol dan masyarkat	100%	1	Verifikasi bantuan dana partai politik	Sosialisasi kegiatan parpol dan masyarkat	1 tahun	89.790.000,00
JUMLAH													5.309.999.400,00

Jember, Januari 2020
Kepala Bakesbang Dan Politik
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO, MM
NIP. 19620131 198201 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Letjen. S.Parman No. 89☎ (0331) 337853Jember

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ /1.31/2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** Kabupaten Jember sebagai manadi maksud dalam Diktum **KESATU** tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagai mana di maksud dalam Diktum **KESATU** dan **KEDUA** bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal Januari 2020

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER**



Drs. BAMBANG HARIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19620131 198201 1 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

Instansi	: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Tugas	: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
Fungsi	: a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
Tujuan	: Mewujudkan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman
Indikator Tujuan	: a. Prosentase konflik sosial didaerah (konflik) yang tertangani b. Prosentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun (kasus) yang tertangani

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terciptanya Situasi dan Kondisi Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	1. Persentase Konflik Sosial di Daerah (konflik) yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah Konflik sosial yang tertangani}}{\text{Jumlah Konflik}} \times 100\%$	Bakesbangpol Kab.Jember	Bakesbangpol Kab.Jember
		2. Persentase pelanggaran hukum dan/atau HAM pertahun (kasus) yang tertangani	$\frac{\text{Realisasi Tahun Sekarang}}{\text{Realisasi Tahun Sebelum}} \times 100\%$	Bakesbangpol Kab.Jember	Bakesbangpol Kab.Jember

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra tahun 2021				
						Capaian Tahun	capaian	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target			Rupiah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman melalui kerukunan antar umat beragama dan pemahaman masyarakat tentang hukum dan penghormatan HAM	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik di masyarakat	1.19.1.19.01.01.16	Pemeliharaan Kantirantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terpeliharanya Kantirantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100%	100%	471.000.000	100%	424.980.700.00	100%	4.369.056.229	100%	4.715.260.779	100%	5.188.024.740	100%	1.421.823.685	100%	16.590.146.133	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.01	Deteksi Dini dalam Rangka Antisipasi Permasalahan Keamanan Pemilu	Output : Persentase Pelaksanaan Deteksi Dini dalam Rangka Antisipasi Permasalahan Keamanan Pemilu.	14,3%	0	0	0	0	100%	450.000.000	100%	226.000.000	100%	253.110.000	100%	96.010.000	100%	1.025.120.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.10	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam memahami sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik di masyarakat.	Persentase jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi tim kewaspadaan dini	4,8%	0	0	100%	281.580.700.00	100%	450.000.000	100%	164.000.000	100%	171.194.300	100%	86.200.000	100%	1.152.975.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.11	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam memahami sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik di masyarakat.	output: Persentase jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tentang kewaspadaan dini masyarakat dalam mengantisipasi gangguan kantrantibmas	1,6%	0	0	100%	143.400.000.00	100%	1.202.272.229	100%	2.256.000.000	100%	2.532.020.300	100%	86.500.000	100%	6.220.192.529	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.	Output: Persentase Terpenuhi Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.	0,30%	100%	301.640.000	0	0	100%	1.141.324.000	100%	1.403.000.000	100%	1.560.055.000	100%	443.920.000	100%	4.849.939.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.16.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.	Output: Persentase Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.	0	100%	169.360.000	0	0	100%	600.000.000	100%	140.800.779	100%	146.185.140	100%	183.733.685	100%	1.240.079.604	Bakesbangpol	Kab. Jember

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi		
						Capaian Tahun	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra tahun 2021	
							target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah			target	Rupiah
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20
				Pencegahan dan penanganan konflik sosial	Output: Persentase adanya lima pencegahan dan penanganan konflik sosial secara terpadu	0	0	0	0	11,00	100%	525.460.000	100%	525.460.000	100%	525.460.000	100%	525.460.000	100%	2.101.840.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama dalam rangka mewujudkan Jember yang beriman dan bertakwa (JEMBER IMTAK)	Meningkatnya komunikasi intern dan antar umat beragama	Jumlah Intensitas pertemuan antar-umat baragama pertahun	1.19.1.19.01.01.17	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Pengembangan Wawasan Kebangsaan	50%	58%	1.021.000.000	58%	1.409.915.100,00	58%	2.038.027.500	58%	2.185.716.631	58%	2.432.248.257	58%	3.073.724.847	100%	12.160.632.335	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.17.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Jember	Output: Persentase sosialisasi dan peningkatan FKUB	24%	0	0		58.977.600,00	15,20%	300.000.000	15,20%	300.000.000	15,20%	300.000.000	15,20%	300.000.000	100%	1.258.977.600	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.17.02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Output: Persentase terciptanya rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	10%	0	0	18%	-	18%	300.000.000	18%	300.000.000	18%	300.000.000	18%	300.000.000	100%	1.200.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Output: PersentaseMeningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	15%	0	0	17%	-	17%	300.000.000	17%	300.000.000	17%	300.000.000	17%	300.000.000	100%	1.200.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.05.4.01.36.17.04	Peningkatan kesadaran bela negara dalam rangka memperkokoh ketahanan bangsa	Output: Persentase Pembentukan kader bela negara	1%	16,5%	1.021.000.000	16,5%	1.350.937.500,00	0%	1.138.027.500	16,50%	1.285.716.631	16,5%	1.532.248.257	16,5%	2.173.724.847	16,5%	8.501.654.735	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.05.17.8	Pemberdayaan pusat pendidikan wawasan kebangsaan (PPWK)	Output: Persentase tercapainya pengembangan wawasan kebangsaan	0	0	0	0	0	0	0	100%	58.058.500	16,50%	58.058.500	16,5%	58.058.500	16,5%	174.175.500	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.05.17.6	Sarasehan hari pancasila	Output : Persentase sarasehan peningkatan hari pancasila	0	0	0	0	0	0	0	100%	75.000.000	16,5%	75.000.000	16,5%	75.000.000	16,5%	225.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.18	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	52%	25%	-	25%	18.010.000,00	25%	261.006.759	25%	284.516.441	25%	316.620.383	25%	400.108.798	100%	1.280.262.381	Bakesbangpol	Kab. Jember

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi		
						Capaian Tahun	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra tahun 2021	
							target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah			target	Rupiah
							7	8	9	10	11,00	12	13	14	15	16	17	18			19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.19.1.19.01.01.18.01	Peningkatan Keg. seminar, talk show, diskusi wawasan kebangsaan.	Output: Persentase Pelaksanaan Keg. seminar, talkshow, diskusi wawasan kebangsaan	52%	0	0	12%	-	12%	161.006.759	12%	184.516.441	12%	216.620.383	12%	300.108.798	100%	862.252.381	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.18.02	Peningkatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Output: Persentase Peningkatan pembauran dengan masyarakat	0	0	0	20%	18.010.000,00	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	20%	100.000.000	100%	418.010.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.05.4.01.36.01.18.03	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Output : Persentase sarasehan peningkatan pemahaman pancasila	0	0	0	0%	-	20%	75.000.000	20%	75.000.000	40%	150.000.000	40%	150.000.000	100%	450.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.20	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	5%	48%	0	48,80%	-	48,80%	632.347.180	48,80%	689.359.142	48,80%	767.144.262	48,80%	969.429.593	100%	3.058.280.177	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.20.01	Peningkatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Output: Persentase penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.	20%	0	0	15%	-	20%	532.347.180	15%	589.359.142	15%	667.144.262	15%	869.429.593	100%	2.658.280.177	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.20.02	Penyuluhan pencegahan praktek prositusi	Output: Persentase Pelaksanaan Keg. seminar, talkshow, diskusi wawasan kebangsaan	0	0	0	20%	-	20%	50.000.000	20%	50.000.000	20%	50.000.000	20%	50.000.000	100%	200.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.20.07	Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur.	Outcome: Persentase Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur. Output: Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur.	0	0	0	20%	-	20%	50.000.000	20%	50.000.000	20%	50.000.000	20%	50.000.000	100%	200.000.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.21	Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat	12 parpol	11,81%	233.117.000	95214%	312.805.000,00	95,21%	1.518.338.832	95,61%	1.658.218.948	98,61%	1.849.183.600	103,8%	2.395.441.136	100%	7.967.104.516	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.21.01	Penyuluhan kepada masyarakat	Output : Persentase Keg. penyuluhan Politik kepada masyarakat.	0	0	0	19,35%	-	19,35%	208.692.000	19,35%	323.500.000	19,35%	236.470.000	22,60%	373.210.000	100%	1.141.872.000	Bakesbangpol	Kab. Jember

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi		
						Capaian Tahun	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra tahun 2021	
							target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah			target	Rupiah
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20
			1.19.1.19.01.01.21	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Output : Persentase Pelaksanaan Koordinasi forum-forum diskusi politik	0	0	0	20,00%	-	20,00%	97.045.000	20,00%	93.041.000	20,00%	164.861.000	20,00%	148.750.000	100%	503.697.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.21.04	Penyusunan data base Partai Politik	Output: Persentase Penyusunan data base Partai Politik.	12 parpol	10,16%	28.537.000	14,72%	5.250.000,00	16,19%	28.759.832	17,81%	57.835.948	19,59%	47.450.600	21,53%	58.771.136	100%	226.604.516	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.21.10	Peningkatan peran dan koordinasi Tim Pemantau perkembangan politik	Output: Persentase Peningkatan peran dan koordinasi Tim Pemantau perkembangan politik	0	1,65%	204.580.000	19,67%	69.185.000,00	19,67%	975.150.000	19,67%	975.150.000	19,67%	1.154.030.000	19,67%	1.494.810.000	100%	4.872.905.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.21.10	Sosialisasi dalam rangka penciptaan situasi pemilu yang aman	Output: Persentase Partisipasi masyarakat di dalam Pemilu semakin meningkat	0	1,65%	204.580.000	19,67%	69.185.000,00	19,67%	975.150.000	19,67%	975.150.000	19,67%	1.154.030.000	19,67%	1.494.810.000	100%	4.872.905.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.21.10	Peningkatan Peran dan Efektivitas Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Pemilu (DESK)	Output: Persentase jumlah peserta yang mengikuti situasi pemilu yang jujur dan adil	0	1,65%	204.580.000	19,67%	69.185.000,00	19,67%	975.150.000	19,67%	975.150.000	19,67%	1.154.030.000	19,67%	1.494.810.000	100%	4.872.905.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.21.11	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Output: Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.	0	0	0	20,00%	100.000.000,00	20,00%	208.692.000	20,00%	208.692.000	20,00%	246.372.000	20,00%	319.900.000	100%	1.083.656.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.21.12	Peningkatan Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilu	Meningkatnya pendidikan politik masyarakat	0	0	0	0,00%	-	20,00%	220.244.600	20,00%	220.244.600	20,00%	220.244.600	20,00%	220.244.600	20%	220.244.600		
			1.19.1.19.01.01.23	Kerjasama antar Lembaga Organisasi Masyarakat dan Politik	Kerjasama antar Lembaga Organisasi Masyarakat dan Politik	54,02%	43,38%	745.458.000	45,52%	121.250.000,00	64,27%	539.118.596	64,27%	587.678.668	64,27%	653.990.484	64,27%	959.735.297	100%	3.607.231.045	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.23.01	Peningkatan konsultasi dan kerjasama ormas.	Output: Persentase jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kemendagri 56 & 57 tahun 2017	29,02%	11,83%	323.221.000	11,83%	75.000.000,00	11,83%	139.025.000	11,83%	151.568.000	11,83%	166.360.000	11,83%	213.327.000	100%	1.068.501.000	Bakesbangpol	Kab. Jember

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi		
						Capaian Tahun	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra tahun 2021	
							target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah			target	Rupiah
							7	8	9	10	11,00	12	13	14	15	16	17	18			19	20
			1.19.1.19.01.01.23.02	Sinkronisasi program hubungan antar lembaga.	Output: Persentase Keg. Sinkronisasi program hubungan antar lembaga.	0	14,90%	324.685.000	17,02%	-	17,02%	208.022.000	17,02%	227.567.000	17,02%	150.150.000	17,02%	319.902.000	100%	1.230.326.000	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.23.04	Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan	Output: Persentase Penyusunan Database Organisasi Kemasyarakatan	0	16,65%	97.552.000	16,67%	46.250.000,00	16,67%	104.016.000	16,67%	113.751.000	16,67%	126.530.484	16,67%	159.951.297	100%	648.050.781	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.23	Peningkatan kesadaran hubungan antar lembaga kemasyarakatan	Output: Persentase Peningkatan kesadaran hubungan antar lembaga kemasyarakatan	25%	0	0	0	-	18,75%	88.055.596	18,75%	94.792.668	18,75%	210.950.000	18,75%	266.555.000	100%	660.353.264	Bakesbangpol	Kab. Jember
Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan penghormatan hak azasi manusia (HAM) yang berkeadilan dalam rangka mewujudkan Jember Kuat dan Bersih	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan penghormatan HAM	Prosentase jumlah pelanggaran hukum dan /atau HAM pertahun (kasus)	1.19.1.19.01.01.24	Pelaksanaan Rencana Nasional Hak Asasi Manusia /RANHAM	Terlaksananya Rencana Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	12%	0	0	15%	63.285.500,00	15%	189.719.154	15%	206.807.743	15%	230.143.279	15%	290.828.878	100%	980.784.554	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.24.01	Peningkatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM)	Output: Persentase Jumlah peserta sosialisasi pelaksanaan RANHAM	0	0	0		63.285.500,00	15%	189.719.154	15%	206.807.743	15%	230.143.279	15%	290.828.878		980.784.554	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.30	Peningkatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial PAW.	Meningkatnya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial PAW.	8 parpol	10 parpol	57.175.000	10 parpol	42.940.000,00	10 parpol 25%	87.270.811	10 parpol 25%	97.199.639	10 parpol 25%	110.468.774	10 parpol 25%	143.447.466	10 parpol 25%	538.501.690	Bakesbangpol	Kab. Jember
			1.19.1.19.01.01.30.05	Fasilitasi dan verifikasi pelaksanaan PAW anggota DPRD dan verifikasi bantuan dana pada partai politik.	Output: Persentase Verifikasi dana bantuan partai politik	8 Parpol	10 Parpol	57.175.000	10 Parpol	42.940.000,00	10 Parpol	87.270.811	10 Parpol	97.199.639	10 Parpol	110.468.774	10 Parpol	143.447.466	10 Parpol	538.501.690	Bakesbangpol	Kab. Jember
Jumlah								2.527.750.000		2.393.186.300		9.634.885.061		10.424.757.991		11.547.823.779		9.654.539.700		46.182.942.831		

Kepala Bakesbang dan Politik
Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2016			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra tahun 2021	
						Capaian Tahun	capaian	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah			target	Rupiah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,00	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Drs.SUPRPTO, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610721 198603 1 011